

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Simpulan yang ditarik berdasarkan pada data yang diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen. Hal ini berarti bahwa perencanaan anggaran yang semakin baik dan akurat tidak selalu diikuti dengan semakin tingginya penyerapan anggaran pada OPD tersebut.
2. Pengadaan barang/jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen. Hal ini berarti bahwa apabila pengadaan barang/jasa semakin baik dari segi proses dan waktu, maka semakin tinggi pula penyerapan anggaran pada OPD tersebut.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kebumen. Hal ini berarti bahwa apabila sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan dengan baik, efektif,

efisien, dan berkelanjutan, maka semakin tinggi pula penyerapan anggaran pada OPD tersebut.

B. Implikasi

Implikasi yang dapat diperoleh dari penelitian ini mengenai pengaruh perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menambah literatur dan memberikan wawasan baru mengenai keuangan daerah serta dapat memberikan ide untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah beberapa variabel bebas dan menambah jumlah responden yang akan memberikan hasil lebih baik dalam memprediksikan hal-hal yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
2. Implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk mengetahui keadaan OPD dalam mengelola sumber daya yang dimiliki melalui pengelolaan APBD.
 - b. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kebumen diharapkan untuk meningkatkan proses pengadaan barang/jasa. Salah satu fokus utama pada banyak OPD adalah kurangnya pejabat/

pelaksana pengadaan yang bersertifikat, bahkan beberapa OPD mengeluhkan tidak memiliki pejabat pengadaan sama sekali dan pada akhirnya meminjam pejabat pengadaan yang ada pada OPD lain. Oleh karena itu, diharapkan OPD dapat menambah jumlah pejabat/pelaksana pengadaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi agar tidak mengalami keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan yang bersertifikat. Seluruh OPD di Kabupaten Kebumen juga diharapkan dapat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah secara efektif dan efisien serta berkelanjutan agar seluruh tujuan organisasi terutama penyerapan anggaran baik secara proporsional tiap triwulan maupun penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai sesuai target. Beberapa OPD seperti dinas telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan cukup baik, namun di Kecamatan sistem pengendalian intern pemerintahnya masih sebagai formalitas saja.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau peraturan terkait dengan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:

1. Sampel dalam penelitian terbatas yaitu hanya mencakup 33 OPD, disarankan untuk mengambil sampel lebih luas seperti menggunakan

seluruh OPD (50 OPD) di Kabupaten Kebumen serta mengambil sampel dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Kebumen yang menjadi satu dengan Kabupaten Purworejo, sehingga dapat lebih digeneralisasi karena lingkupnya tidak hanya APBD tetapi juga APBN.

2. Responden yang diambil disarankan untuk ditambah dengan pegawai yang lain, seperti pejabat pengadaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat penandatanganan surat perintah membayar agar informasi yang di dapat memberikan hasil yang akurat dalam memprediksikan penyerapan anggaran.